

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas visa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 melalui Perpres No 21 Tahun 2016, memiliki kepentingan nasional didalamnya. Adapun kepentingan tersebut berupa kepentingan Indonesia untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan juga untuk meningkatkan kunjungan investor khususnya asal Tiongkok.

Alasan utama yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah adanya kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia khususnya yang berasal dari Tiongkok. Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah juga mengharapkan kunjungan investor untuk melihat peluang berbisnis di Indonesia dengan melakukan investasi. Kebijakan strategis ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional atau ekowisata.

Berbicara mengenai keuntungan ekonomi, maka pemberian bebas visa terhadap 169 negara yang ada di dunia merupakan salah satu faktor yang akan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Dari segi ekonomi, maka

keuntungan dari diberlakukannya kebijakan bebas visa Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan devisa negara
2. Membuka peluang investasi
3. Meningkatkan transaksi jual beli produk dalam negeri oleh Wisatawan
4. Memajukan pariwisata nasional.

Berlakunya implementasi BVK merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kepentingan pariwisata Indonesia di dunia internasional. Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Target utamanya adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing yang kondisi tersebut bisa berpengaruh pada akses pendapatan nasional.

Meski begitu, kebijakan tentang bebas visa terhadap 169 negara tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh wisatawan ataupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Selain manfaat berupa penambahan devisa, perubahan kebijakan ini juga memiliki beberapa potensi dampak negatif bagi Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut mencakup kemungkinan terjadinya *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.